

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Rembang

Halaman 5

Aset di Empat OPD Masih Bermasalah

BPK Blejeti Keuangan Pemkab

REMBANG-Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah melakukan pemeriksaan interim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Rembang sejak Rabu (13/2) lalu.

Sosialisasi kegiatan dilakukan di Aula Kantor Bupati Rembang yang dihadiri Sekda Rembang Subakti dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala sub Auditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng 1

Bagus Kurniawan mengatakan, pemeriksaan interim LPKD 2018 akan dimulai Senin (18/2) selama 25 hari.

Pada kegiatan selama di Rembang, BPK akan meneliti hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, menilai efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan laporan keuangan, menilai kepatuhan pada perundang-undangan. "Selain itu, pemeriksaan in-

terim juga menguji substantif atas kas, belanja modal, persediaan, belanja hibah, bansos, aset tetap, pendapatan dan piutang, serta mendukung perencanaan audit LKPD 2018," katanya.

Bagus menjelaskan, pemeriksaan interim dilakukan, sebab LKPD 2018 saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Pemkab dan masih dalam proses review oleh Inspektorat.

"Setelah ▶ *Baca ASET... 10*

pemeriksaan interim selesai, nanti dilanjutkan pemeriksaan terinci terhadap LKPD yang telah selesai disusun dan diserahkan ke BPK. Kemudian mulai April nanti untuk

pemeriksaan laporan keuangannya," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Rembang, Subakti, berharap dengan pemeriksaan LKPD

2018, Pemkab akan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pasalnya seluruh jajaran Pemkab di tiap OPD telah berupaya keras dalam menyelesaikan permasalahan

han aset.

"Permasalahan aset menjadi salah satu ganjalan dalam perolehan WTP. Ada empat OPD yang bermasalah, yakni Setda, DPU

TARU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan," ungkapnya.

Hingga kini, kata Subakti, Kabupaten Rembang belum pernah mendapatkan WTP. Namun

dirinya yakin dengan komitmen dari Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Wakil Bupati Bayu Andriyanto tahun ini Rembang akan sukses meraih WTP. **(sov/lis)**